

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ²¹ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya:

“Hai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan.”

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

1. Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk ber-wudu dan *takbīratul iḥrām* untuk shalat.²² Maka yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri, di mana tanpa adanya salah satu rukun, maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan.²³

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan

²¹ Abū Al-Ḥasan Nūriddin Muhammad bin ‘Abd Al-Ḥādī Al-Sindiy, *Shahīḥ Bukhari bi Al-Hāsiyyah Imām Al-Sindiy, Jilid 3*, (Beirut Lebanon : Dār Al-Kitāb Al-Ilmiyah, 1971), 422.

²² H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, 12.

²³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 30.

²⁵ Abū Abdillāh Muhammad Ibn Yazīd al-Quzwainiy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), 590.

1) Wali Nasab

(a) Bapak, kakek (orang tua bapak) dan seterusnya ke atas.

(c) Saudara laki-laki sebakak lain ibu.

(d) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung.

(e) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seterusnya ke bawah.

(f) Paman, yaiu saudara dari bapak sekandung.

(g) Paman seapak, yaitu saudara dari bapak seapak lain ibu

(h) Anak laki-laki paman kandung (saudara sepupu)

(i) Anak laki-laki paman seabapak.

2) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali yang ditugaskan oleh kepala negara yang beragama Islam untuk menikahkan seorang wanita dengan seorang laki-laki pilihannya. Penugasan wali hakim dimaksudkan karena bagi setiap wanita yang mau menikah merupakan syarat mutlak pernikahannya dilakukan oleh seorang wali. Kalau wanita yatim piatu yang tidak

mengetahui dan diketahui asal keturunannya, maka hukum Islam menegaskan bahwa wali perkawinannya adalah Kepala Negara, tetapi seorang Kepala Negara tidak mungkin setiap hari menikahkan wanita karena itu ditetapkan sebagai wali pengganti dan berwenang adalah Pejabat Kantor Urusan Agama.²⁶

2. Syarat Perkawinan

Secara garis besarnya, syarat sahnya perkawinan ada dua:

- ³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 59.

³⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 46.

³⁵ Yaswirman, *Hukum Keluarga*, 195.

- b. Akad nikah dihadiri oleh para saksi.³⁶

Adapun syarat-syarat secara rinci sebagai berikut:

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Laki-laki.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat memberikan persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon istri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
 - b. Perempuan.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat dimintai persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.³⁷
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki.
 - b. Dewasa.
 - c. Mempunyai hak perwalian.

³⁶ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut, Dār al-Fikr, 2006), 48.

³⁷ Amior Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, 62.

- d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- a. Minimal dua orang laki-laki.
 - b. Hadir dalam *ījāb* dan *qabūl*.
 - c. Dapat mengerti maksud akad.
 - d. Islam.
 - e. Dewasa.
- 5) *ījāb qabūl*, syarat-syaratnya:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 - c. Memakai kata-kata *nikāh*, *tazwīj* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - d. Antara *ījāb* dan *qabūl* bersambungan.
 - e. Antara *ījāb* dan *qabūl* jelas maksudnya.
 - f. Orang yang terkait dengan *ījāb* dan *qabūl* tidak sedang *iḥrām* haji atau *‘umrah*.
 - g. Majelis *ījāb* dan *qabūl* itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.³⁸

³⁸ *Ibid.*, 63.

Artinya: *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*⁴⁴

Hukum perkawinan telah diatur sedemikian rupa oleh syari'ah dalam rangka membentuk ummat yang ideal. Untuk mencapai ummat yang ideal ini al-Qur'an telah menjelaskan macam-macam larangan dalam perkawinan.⁴⁵ Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita menurut

⁴⁵ A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 224.

syara' dikelompokkan kepada dua bentuk: larangan *mu-abbad* (halangan abadi) dan larangan *mu-aqqat* (halangan sementara).⁴⁶

1. Mahram Mu-abbad

Mahram mu-abbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya. Ini terdiri dari empat kelompok, yaitu:

Pertama, karena adanya hubungan kekerabatan. Golongan perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selamanya adalah sebagai berikut:

- a. Ibu; ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas;
- b. Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. Saudara, baik kandung, seayah, maupun seibu;
- d. Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- e. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas;

⁴⁶ H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 81.

- f. Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah;
- g. Anak saudara perempuan kandung, seayah atau seibu; cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.⁴⁷

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki sebagai berikut:

- a. Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas;
- b. Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya ke bawah;
- c. Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu;
- d. Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah, atau seibu dengan ayah; saudara laki-laki kakek, kandung, seayah atau seibu dengan kakek dan seterusnya ke atas;
- e. Saudara-saudara laki-laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan ibu; saudara laki-laki nenek, kandung, seayah, maupun seibu dengan nenek, dan seterusnya ke atas;
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 111.

- g. Anak laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.⁴⁸

Kedua, adanya larangan perkawinan yang disebabkan oleh hubungan perkawinan⁴⁹ atau yang disebut hubungan *musāharah*. Golongan perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki untuk selamanya karena hubungan *musāharah* adalah sebagai berikut:

- Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri;
- Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu;
- Ibu istri atau mertua;
- Anak dari isteri dengan ketentuan isteri tersebut telah digauli.⁵⁰

Sebaliknya, seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *muṣāharah* sebagai berikut:

- a. Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya;
- b. Ayah dari suami atau kakeknya;
- c. Anak-anak dari suaminya atau cucunya;
- d. Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.⁵¹

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1983), 37.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 112.

⁵¹ *Ibid.*, 115.

Ketiga, karena hubungan persusuan. Seorang anak yang menyusui kepada seorang perempuan, air susu perempuan tersebut menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan oleh suaminya, sehingga suami perempuan tersebut sudah seperti ayah sendiri. Oleh karena itu, hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab.⁵²

Perempuan yang haram dikawini karena hubungan susuan itu sebagai berikut:

- a. Ibu susuan: yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai seorang ibu bagi anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan perkawinan.
- b. Nenek susuan: yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui dipandang seperti ayah bagi anak susuan, sehingga haram melakukan perkawinan.
- c. Bibi susuan: yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
- d. Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.

⁵² *Ibid.*

- e. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.⁵³

Susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan adalah susuan yang diberikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan dari air susu. Kadar yang menimbulkan keharamannya tidak dibatasi jumlahnya, asalkan seorang bayi telah menyusu dan kenyang pada seseorang menurut pendapat Ḥanafī dan Mālīkī.⁵⁴ Sedangkan menurut Yūsuf Qarḍawī dalam buku Halal Haram dalam Islam menjelaskan syarat yang menjadi keharaman perkawinan adalah terjadi pada waktu kecil sebelum mencapai umur dua tahun. Selain itu, tidak kurang dari lima kali susuan yang mengenyangkan.⁵⁵

Keempat, haram dikawin karena sumpah *li'ān*.⁵⁶ Yaitu Apabila seorang suami menuduh isteri berbuat zina tanpa adanya saksi yang cukup, maka sebagai gantiya suami mengucapkan persaksian pada Allah bahwa ia berada dipihak yang benar dalam tuduhannya dengan bersumpah sampai empat kali, dan yang kelimanya ia menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila ternyata ia berdusta dalam tuduhannya. Isteri yang dituduh akan bebas dari hukumannya

⁵³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 108.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Yūsuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), 255.

⁵⁶ Tim Dārul Fikr, *Fiqḥum Nisā' fī Al-Thahārāh, Al-Wuḍū'i, Al-Ṣalāti, Al-Zakāti, Al-Ṣiyāmi, Al-Ḥajji, Al-Nikāhi, Al-Zawāj, Al-Ṭolāqī*. terj. Soleh Hasan, *Fiqh Wanita: Kajian Komprehensif Seputar Masalah Bersuci, Wudhu, Sholat, Zakat, Puasa, Haji, Nikah, Talaq*, (Solo: Media Insani, 2007), 681.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

Ketujuh, wanita yang sedang dalam masa 'iddah, baik 'iddah cerai ataupun 'iddah karena ditinggal mati suaminya. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَ أَحْلَاهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut."⁶⁹

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 39.